

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adi Sasono & Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Afiyanti, Yati & Rachmawati, Imami Nur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rajawali Press.hlm.12
- Arba,H.M, 2019, *Hukum Pengdaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ardian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Edisi Revisi Bayumedia, Malang.
- Maria S.W Soemardjoyo, 2011, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas.
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2017, *Rencana Investasi Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso*, Bondowoso, DOCRPIJM.
- Perter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Predana Group.
- Rahayu Feby Antasari, 2008, *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan*, Undip
- Samun Ismaya, 2013, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Supriadi, 2016, *Hukum Agraria*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika

Syarifin Pipin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia.

Yunita Reykasari, Lutfian Ubaidillah, 2020, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Di Kabupaten Jember*, Universitas Muhammadiyah Jember.

Zaman Nurus, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Refika Aditama: Madura.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Penatgunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Keteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017 - 2013

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

3. Jurnal

Bambang S. Widjanarko, Moshedayan Pakpahan, Bambang Rahardjono, dan Putu Suweken. 2001. *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*". Makalah Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah.

Efridawati dan M. Arif Nasution, 2013, *Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan*, Medan: Universitas Medan Area.

Layla Mardiyani Fauziah & Nia Kurniati, 2018, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah*, Volume 2 nomor 1, Universitas Padjajaran.

Muhammad Dika Yudhistira. 2013. *Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan dikabupaten bekasi jawa barat*. Fakultas Ekonomi dan Pertanian Bogor. Universitas Pertanian Bogor.

Nian Riawati, 2018, *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso*. Volume 6 nomor 2 Jember, Universitas Jember.

Ratri Puspita Suryandari & Ana Silviana, 2016 *Penerapan Asas Fungsi Sosial Terkait Kepemilikan Tanah*, Volume 5 nomor 3, Universitas Diponegoro.

Rifqy Maulana & Jamhir, 2018, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tri Handayani, 2014, *Alih Fungsi Tanah Menjadi Perumahan*, Volume 3 nomor 2, Diponegoro Law Review. Universitas Diponegoro.

Yuniarti Amelhia Lapatandu, 2017, *Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara*, Volume 13 Nomor 2A, Agrisosio Ekonomi Unsrat.

Zaka Dhirma Aditya, 2015 *Kepentingan Pemerintah Melawab Kepentingan Umum*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Airlangga.

4. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia>

<https://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/konversi-lahan>

5. Wawancara

Abdi Wijaya. 2021. *Akibat Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian*. BPN. Bondowoso. 30 menit.



Lampiran

Prosedur Wawancara

A. Pengantar

1. Memberi salam dalam ucapan terimakasih atas kesediaan memberikan informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang pendidikan
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang dari 30 menit.
4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara.

B. Tujuan

Melakukan wawancara tentang akibat hukum alih fungsi lahan pertanian di kabupaten bondowoso khususnya tanah yang masuk dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) terhadap pemilik dan penguasa lahan.

C. Prosedur

1. Meminta izin untuk melakukan wawancara.
2. Meminta kepada narasumber untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif.
3. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya

D. Kesimpulan dan Penutup

1. Pewawancara membuat rangkuman tentang hasil wawancara
2. Menanyakan apakah ada informasi yang tertinggal
3. Mengucapkan terimakasih kepada narasumber atas informasi, kesempatan yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat penting.

Gambar Dokumentasi



Gambar 1; Wawancara 14 Februari 2021

